

PENGARUH IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI MANAJEMENAN DAERAH DAN KEGIATAN PENGENDALIAN TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (SURVEY PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) KOTA PALU)

Erviana

pungvinabil@gmail.com

Mahasiswa Program Studi Magister Manajemen Pascasarjana Universitas Tadulako

Abstract

The research is aimed to explore and analyze: 1) The implementation of local management information system and controlling activities; 2) Significant influence of local management information system implementation and controlling activities on the quality financial statements; 3) Significant influence of local management information system implementation on the quality financial statements; 4) Significant influence of controlling activities on the quality financial statements. The test result find that: a) The implementation of local management information system and controlling activities have significant influence on the quality financial statements. b) The implementation of local management information system has positive but insignificant influence on the quality financial statements. This is shown by coefficient regression value of 0.089 or 0,89 % with significant value of 0,090. c) controlling activity has significant influence of the quality of financial statements with coefficient regression value of 0.190 or 19,0 % and significant value at 0,000.

Keywords: *The Implementation of Local Management Information System, Controlling Activities, and The Quality of Financial Statements.*

Laporan keuangan merupakan media bagi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan kinerja keuangannya kepada publik, untuk itu pemerintah harus mampu menyajikan laporan keuangan yang mengandung informasi keuangan yang berkualitas. Dalam Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang SAP dijelaskan bahwa laporan keuangan berkualitas itu memenuhi karakteristik, relevan, andal dan dapat dibandingkan serta dapat dipahami

Pernyataan kualitas atas laporan keuangan berupa opini yang diberikan oleh auditor ekstern sesuai dengan pasal 23 ayat 5 Undang-Undang Dasar 1945 diperlukan agar, suatu laporan keuangan dapat memberikan keyakinan kepada penggunaannya dan dipergunakan dalam proses pengambilan keputusan. Yang berwenang untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara Indonesia adalah Badan Pemeriksa Keuangan.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 terdapat 4 (empat) jenis Opini yang diberikan oleh BPK RI atas Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah. BPK dapat memberikan empat jenis opini, yaitu : 1) Opini Wajar Tanpa Pengecualian (*unqualified opinion*), 2) Opini Wajar Dengan Pengecualian (*Qualified opinion*), 3) Opini Tidak Memberikan Pendapat (*Disclaimer opinion*), 4) Opini Tidak Wajar (*Adverse opinion*).

Laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) setiap tahunnya mendapat penilaian berupa opini dari Badan Pengawas keuangan (BPK), ketika Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) diberikan terhadap laporan keuangan pemerintah daerah, dapat dikatakan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah tersebut disajikan secara wajar dan berkualitas. Untuk itu pemerintah pusat dan pemerintah daerah sudah seharusnya meningkatkan kualitas laporan keuangan yang mengandung informasi

keuangan yang dibutuhkan berbagai pihak agar dapat meningkatkan kredibilitasnya.

Faktor yang sangat berperan tentunya sumber daya manusia, namun, selain sumber daya manusia, faktor lain yang mempengaruhi kualitas informasi akuntansi pada pelaporan keuangan pemerintah adalah pemanfaatan teknologi informasi yang dapat dikembangkan dalam Sistem Informasi Manajemen. Rahadi (2007) menyatakan bahwa Teknologi Informasi (TI) mempunyai manfaat atau kemudahan bagi seseorang dalam menghemat waktu maupun tenaga. Kewajiban pemanfaatan teknologi informasi oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah yang merupakan pengganti dari PP No. 11 Tahun 2001 tentang informasi keuangan daerah yang isinya

Secara umum, Sistem Informasi Manajemen (SIM) merupakan suatu sistem yang dapat membantu manajemen di dalam pengumpulan data, pengolahan serta analisis evaluasi data dan menyajikan ke dalam informasi yang bernilai dan akhirnya sampai pada pengambilan keputusan di mana informasi ini berguna untuk mendukung fungsi operasi manajemen (Machmud, Rizan. 2013).

Gordon, (2002:11) menyatakan bahwa sistem informasi manajemen adalah “sebuah sistem manusia/mesin yang terpadu untuk menyajikan informasi guna mendukung fungsi operasi manajemen dan pengambilan keputusan dalam suatu organisasi”. Sistem informasi manajemen memiliki tiga faktor dalam penerapannya, yaitu faktor teknis, faktor operasional, dan faktor ekonomis.

Guna mendukung akuntabilitas pengelolaan keuangan oleh Pemerintah Daerah inilah, BPKP melakukan penyusunan suatu program aplikasi pengelolaan keuangan daerah, yaitu Program Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA).

Aplikasi Sistem informasi Manajemen Daerah (SIMDA) adalah aplikasi komputer Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) terpadu dibangun sebagai alat bantu pemerintah

daerah dalam menjalankan sistem akuntansinya mulai dari penganggaran sampai dengan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah (BPKP, 2006), yang outputnya meliputi:

1) Penganggaran

Rencana Kerja Anggaran (RKA), RAPBD dan Rancangan Penjabaran APBD, APBD dan Penjabaran APBD beserta perubahannya, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

2) Penatausahaan

Surat Penyediaan Dana (SPD), Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM), SPJ, Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Surat Tanda Setoran (STS), beserta register-register, dan formulir-formulir pengendalian anggaran lainnya.

3) Akuntansi dan Pelaporan

Jurnal, Buku Besar, Buku Pembantu, Laporan Keuangan (Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas dan Neraca), Perda Pertanggungjawaban dan Penjabarannya

Laporan keuangan pemerintah daerah selain memerlukan suatu sistem Informasi Manajemen yang dapat mendukung dalam pembuatan laporan keuangan, diperlukan pula suatu Kegiatan Pengendalian sebagaimana yang diamanatkan dalam PP No. 60 Tahun 2008 tentang Pengendalian Intern Pemerintah. SPIP merupakan sistem pengendalian intern yang menjadi salah satu bagian dalam pemeriksaan keuangan dan diselenggarakan secara menyeluruh dilingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Selain memberikan opini, pemeriksaan keuangan juga mengungkapkan temuan yang terkait dengan Sistem Pengendalian Intern. Ini didasari dari hasil pemeriksaan keuangan yang disajikan dalam 3 bagian yaitu: (1) opini; (2) Sistem Pengendalian Intern dan (3) kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan (BPK, 2012).

Kegiatan pengendalian adalah bagian dari unsur Pengendalian Intern yang wajib diterapkan dalam instansi pemerintah. Kegiatan

Pengendalian menurut PP No. 60 Tahun 2008 adalah “tindakan yang diperlukan untuk mengatasi resiko serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur, untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi resiko telah dilaksanakan secara efektif”.

Beberapa bentuk kegiatan pengendalian yang dapat diterapkan pada berbagai tingkat organisasi yang sifatnya praktis secara menyeluruh disemua instansi pemerintah, yaitu :

- a. Riveu atas kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan.
- b. Pembinaan Sumber Daya Manusia
- c. Pengendalian atas Pengelolaan Sistem Informasi
- d. Pengendalian fisik atas asset;
- e. Penetapan dan Reviu atas Indikator dan Ukuran Kinerja
- f. Pemisahan fungsi
- g. Otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting
- h. Pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kebijakan
- i. Pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya
- j. Akuntabilitas terhadap sumberdaya dan pencatatannya
- k. Dokumentasi yang baik atas Sistem Pengendalian intern serta transaksi dan kejadian penting

Kualitas laporan keuangan daerah yang tercermin dari opini BPK RI, sangat dipengaruhi oleh Kegiatan Pengendalian yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Kegiatan Pengendalian Intern yang baik akan meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan keandalan laporan keuangan pemerintah, hal ini juga sesuai dengan pernyataan dari *framework internal control COSO* yaitu pengendalian intern merupakan sebuah proses yang dilakukan manajemen dan personal entitas lainnya. Proses ini di desain untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian tujuan dengan efektif dan efisien dalam operasi, keandalan laporan keuangan, dan menjamin manajemen mematuhi hukum dan aturan yang berlaku (COSO:2004).

Berdasarkan uraian di atas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Untuk mengetahui bagaimana implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA), Kegiatan Pengendalian dan Kualitas Laporan Keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kota Palu. 2) Untuk mengetahui pengaruh secara simultan Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) dan Kegiatan Pengendalian terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Palu, 3) Untuk mengetahui pengaruh Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Palu, dan 4) Untuk mengetahui pengaruh Kegiatan Pengendalian terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Palu.

METODE

Populasi dalam penelitian ini adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terdiri dari 87 SKPD. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik *proporsional stratified sampling*. Melihat jumlah populasi yang masih relatif tinggi, maka untuk mendapatkan sampel yang representatif dapat dilakukan sampling dengan menggunakan rumus Taro Yaname (Riduwan:65) yaitu :

$$n = \frac{N}{N \cdot d^2 + 1}$$

Keterangan :

n = Jumlah Sampel

N = Jumlah Populasi

d² = Tingkat kesalahan penarikan sampel 10 % dan tingkat kepercayaan 90%.

Berdasarkan perhitungan sampel diatas maka diperoleh jumlah sampel sebesar 47 dengan memilih 2 (dua) responden pada masing-masing SKPD sehingga diperoleh jumlah responden keseluruhan sejumlah 94 orang . Pemilihan responden yaitu Kepala Sub Bagian Keuang dan Aset dan Bendahara

Kuangan didasari atas asumsi bahwa responden inilah yang melakukan dan terlibat langsung secara teknis dalam hal penyusunan laporan keuangan.

Definisi operasional variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y) adalah prestasi yang dicapai oleh Pemerintah Kota Palu pada Tahun 2015 yang mencerminkan kondisi pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2015. Variabel ini dibentuk dari variabel terukur berdasarkan indikator kualitas Laporan Keuangan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyebutkan bahwa karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya yaitu kualitas yang dikehendaki dengan kriteria (1) Relevan; (2) Andal ; (3) Dapat dibandingkan ; (4) Dapat dipahami.
2. Variabel Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA merupakan salah satu produk dari teknologi sistem informasi yang digunakan oleh banyak pemerintah daerah di Indonesia dalam menyelenggarakan pengelolaan keuangan daerahnya. Menurut Djaja dalam (Fuad Budiman dan Fefri Indra Arza. 2013), Aplikasi SIMDA merupakan aplikasi database yang bertujuan untuk mempermudah pengelolaan keuangan daerah di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
3. Kegiatan Pengendalian sebagai salah satu unsur dari Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah merupakan tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk

memastikan bahwa tindakan mengatasi risiko telah dilaksanakan secara efektif.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner dan observasi untuk mendapatkan data-data pendukung dalam penelitian ini. Selanjutnya agar hasil penelitian dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah, maka data-data penelitian yang diperoleh melalui kuesioner sebelum digunakan terlebih dahulu diuji keakuratan dan keandalannya sebagai alat ukur. Melalui dua bentuk pengujian untuk menguji kualitas data yang diperoleh dari penerapan instrumen, maka diperlukan uji validitas dan uji reliabilitas.

Teknik analisa data yang digunakan meliputi :

1. Uji Asumsi Klasik yang terdiri dari : Uji Normalitas, Uji Multikolinieritas dan Uji Heteroskedastisitas.
2. Analisis Regresi Linier Berganda
Alat analisis yang digunakan adalah teknik analisis regresi berganda dengan formulasi sebagai berikut :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Dimana:

Y=Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

a= Intersep (Konstanta)

b₁, b₂, = Koefisien Regresi

X₁=Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah

X₂=Kegiatan Pengendalian

e= Kesalahan pengganggu (*error term*)

3. Pengujian Hipotesis

Pengujian terhadap hipotesis yang diajukan dilakukan terdiri dari pengujian secara simultan (Uji F), pengujian secara parsial (Uji t) dan analisis koefisien determinasi (R²).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengumpulan data dengan menggunakan kuisisioner yang didistribusikan langsung kepada responden sejumlah 94 orang. Dari 94 kuisisioner

yang disebar terhitung 100% yang dikembalikan, sehingga data yang dapat diolah sejumlah 94 kuisisioner

Pernyataan dari 94 kuisisioner kemudian dilakukan tabulasi untuk memperoleh gambaran penyebaran data dan melakukan penghitungan nilai mean untuk dapat memberikan interpretasi atas tiap pernyataan dengan cara melakukan distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi bertujuan untuk memudahkan dalam penyajian data, pemahaman dan memudahkan data untuk dibaca.

Analisis deskriptif digambarkan dengan model distribusi frekuensi dimana pengelompokan datanya didasarkan pada data kategori dalam skala likert yang diurutkan berdasarkan bobot sangat tidak setuju sampai dengan sangat setuju (skor 1 sampai dengan skor 5). Untuk menginterpretasi nilai mean dalam frekuensi variabel maka dapat ditunjukkan pada skala interval sebagai berikut :

Tabel 1. Kategopri Skala Interval

No.	Skala Interval	Kategori
1.	1,00 – 1,80	Sangat Tidak Baik
2.	1,81 – 2,60	Tidak Baik
3.	2,61 – 3,40	Sedang
4.	3,41 – 4,20	Baik
5.	4,21 – 5,00	Sangat Baik

Hasil distribusi frekuensi pada penelitian ini dengan menggunakan skala interval diatas diperoleh hasil

Tabel 2. Nilai Mean Dominan per Variabel

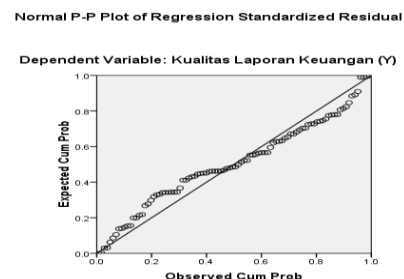
Variabel	Nilai Mean	Dimensi Dominan	Nilai Mean	Kategori
Implementasi SIMDA (X ₁)	4,27	Faktor Ekonomi	4,32	Sangat Baik
Kegiatan Pengendalian (X ₂)	4,12	Pencatatan yang akurat dan tepat waktu	4,20	Baik
Kualitas Laporan Keuangan (Y)	4,12	Relevan	4,17	Baik

Sumber : data primer yang olah tahun 2016

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa dimensi yang paling dominan berdasarkan tanggapan responden adalah Faktor Ekonomis dengan nilai *mean* 4,32 pada variabel Implementasi SIMDA. Hasil ini menunjukkan bahwa SIMDA telah dimplementasi di semua SKPD dalam pengelolaan keuangan pemerintah Kota Palu. SIMDA secara ekonomi dirasakan oleh pengguna sebagai aplikasi yang praktis dan ekonomis sehingga lebih memudahkan dalam pengelolaan keuangan. Berikutnya terdapat kegiatan pengendalian dengan nilai *mean* sebesar 4,20 pada variabel kegiatan pengendalian, dan posisi terakhir dimensi relevan dengan nilai *mean* 4,17 pada variabel kualitas laporan keuangan

Hasil Uji asumsi klasik pada penelitian ini yaitu :

- 1) **Uji Normalitas**, titik sebaran data yang dihasilkan memperlihatkan data tersebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal sehingga dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini adalah data normal



- 2) **Uji Multikolinieritas**, dengan menggunakan *Variance Inflation Factor* (VIF) seperti pada tabel berikut:

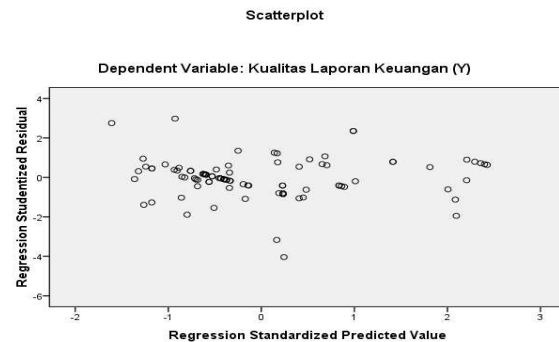
Tabel 3. Hasil Uji Multikolinieritas

No.	Varibel Independen	Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
	Implementasi SIMDA (X ₁)	0,520	1,923
	Kegiatan Pengendalian (X ₂)	0,520	1,923

Sumber : Lampiran Hasil Regresi

Menunjukkan bahwa nilai VIF dari variabel-variabel independen dalam model regresi kurang dari angka 10 sedangkan nilai *Tolerance* lebih besar dari 0,10, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel tersebut tidak terdapat gejala multikolinearitas.

3) Uji Heteroskedastisitas yang diperoleh dari *scatter plot* yang menunjukkan titik-titik pada grafik menyebar secara acak di atas dan di bawah angka nol pada sumbu Y dan tidak membentuk pola tertentu. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas sebagaimana dapat dilihat pada gambar berikut



Hasil analisis Regresi Linear Berganda, uji simultan F dan uji parsial t diperoleh hasil perhitungan sebagai berikut:

Tabel 4. Hasil Perhitungan Regresi Berganda

Dependen Variabel Y = Kualitas Laporan Keuangan				
Variabel	Koefisien Regresi	Stand Error	t	Sig
C = Constanta	5,999	2,648	2,266	0,026
X ₁ = Implementasi SIMDA	0,089	0,052	1,714	0,090
X ₂ = Kegiatan Pengendalian	0,190	0,027	6,932	0,000
R-	= 0,767			
R-Square	= 0,588	F-Statistik	= 64,879	
Adjusted R-Square	= 0,579	Sig. F	= 0,000	

Sumber: Hasil Regresi

Model regresi yang diperoleh dari tabel diatas adalah:

$$Y = 5.999 + 0.089X_1 + 0.190X_2$$

Hasil persamaan regresi linier berganda tersebut di atas menunjukkan bahwa :

1. Nilai konstanta sebesar 5,999. Hal ini mengindikasikan bahwa Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Palu sebelum adanya variabel indeviden (Sistem Informasi Manajemen Daerah dan Kegiatan Pengendalian) adalah sebesar 5,999.
2. Variabel Implementasi Sitem Informasi Manajemen Daerah (X₁) dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,089 menunjukkan pengaruh yang positif. Artinya semakin baik dan maksimal Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA)

diimplementasikan sebagai sebuah sistem dalam pengelolaan keuangan maka akan mempengaruhi kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota Palu menjadi lebih baik.

3. Variabel Kegiatan Pengendalian menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,190 dan nilai signifikan sebesar 0,000. Hasil ini 2menunjukkan bahwa dengan semakin baik prosedur dan pelaksanaan kegiatan pengendalian pada SKPD Pemerintah Kota Palu, maka akan semakin meningkatkan pula Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Palu.

Pengujian Hipotesis Pertama

Berdasarkan Tabel 1 terlihat hasil uji determinasi (kehandalan model)

memperlihatkan nilai R-Square = 0,588 atau = 58,80%. Hal ini berarti bahwa sebesar 58,80% variabel tidak bebas dipengaruhi oleh kedua variabel bebas, selebihnya variabel tidak bebas dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti.

Selanjutnya dari hasil perhitungan regresi diperoleh $F_{hitung} = 64.879$ pada taraf nyata $\alpha = 0,05$ atau $P < 0,05$. dan nilai signifikansi $F = 0,000$. Sehingga dapat dinyatakan bahwa secara bersama-sama (simultan) variabel bebas mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel tidak bebasnya. Dengan demikian maka hipotesis yang menyatakan bahwa: "Secara simultan Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah, dan Kegiatan Pengendalian berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Palu" berdasarkan hasil Uji-F ternyata *terbukti*.

Pengujian Hipotesis Kedua dan Ketiga.

Pengujian secara parsial dimaksudkan untuk melihat pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel tidak bebasnya, sebagai berikut:

1. Implementasi SIMDA (X_1)

Variabel Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah, dari hasil penghitungan statistik menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi sebesar 0,089, sementara tingkat signifikan t sebesar 0,090. Dengan demikian nilai $\text{sig } t > 0,05$ pada taraf kepercayaan 95%, sehingga dapat dinyatakan bahwa Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah berpengaruh positif tetapi tidak nyata (signifikan) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Palu. Dengan demikian hipotesis kedua yang menyatakan bahwa "secara parsial Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Palu" ternyata *tidak terbukti*.

2. Kegiatan Pengendalian (X_2)

Variabel Kegiatan Pengendalian, dari hasil penghitungan statistik menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi sebesar 0,190, sementara tingkat signifikan t sebesar 0,000. Dengan demikian nilai $\text{sig } t < 0,05$ pada taraf kepercayaan 95%, sehingga dapat dinyatakan bahwa Kegiatan Pengendalian berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Palu. Dengan demikian hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa "secara parsial Kegiatan Pengendalian berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Palu", berdasarkan hasil uji - t ternyata *terbukti*.

Berikut akan dijelaskan hasil penelitian terhadap Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) dan Kegiatan Pengendalian terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Palu.

Pengaruh Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Palu

Hasil analisis regresi terhadap hipotesis pertama dapat dijelaskan bahwa Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah dan Kegiatan Pengendalian secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Palu. Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat diinterpretasikan bahwa dengan adanya Sistem Informasi Manajemen Daerah yang terimplementasi dengan baik dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah dan ditunjang dengan dilaksanakannya kegiatan pengendalian yang baik sesuai prosedur yang telah ditetapkan maka akan memberikan pengaruh yang baik terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Sistem informasi yang digunakan dalam pengelolaan keuangan Pemerintah Kota Palu yakni SIMDA, telah diimplementasikan oleh seluruh SKPD Pemerintah Kota Palu, dimana informasi yang dihasilkan oleh SIMDA merupakan informasi yang selanjutnya

digunakan dalam laporan keuangan SKPD dan pada akhirnya menjadi laporan keuangan pemerintah Kota Palu.

Sampai saat ini Pemerintah Kota Palu telah mengimplementasikan SIMDA secara efektif pada level laporan keuangan. Semua proses yang terjadi dalam mekanisme penyusunan laporan keuangan dengan menggunakan SIMDA keuangan merujuk pada peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah mulai dari proses penyusunan RKA, proses penyusunan DPA, proses pembuatan anggaran kas, proses pergeseran anggaran sampai pada proses perubahan anggaran.

Selain SIMDA sebagai sistem yang mendukung dalam proses pengelolaan keuangan, perlu suatu kegiatan pengendalian yang dilaksanakan sesuai prosedur secara sistematis baik dari tingkat pimpinan maupun seluruh staf sebagaimana yang diamanatkan Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2008 tentang Pengendalian Intern Pemerintah. Dimana setiap Instansi atau SKPD wajib menyelenggarakan Kegiatan Pengendalian.

Berdasarkan hasil distribusi frekuensi, pernyataan-pernyataan responden untuk variabel kegiatan pengendalian dapat dikatakan baik, artinya kegiatan pengendalian sebagai upaya pemerintah Kota Palu untuk meminimalisir resiko yang mungkin terjadi sudah dilaksanakan, upaya yang telah dilakukan diantaranya dengan menetapkan prosedur pengamanan aset, pengendalian atas sistem informasi yang dimiliki, pelimpahan tugas secara sistematis untuk memastikan check and balance maupun otorisasi atas transaksi untuk meyakinkan transaksi telah diperiksa atau diteliti kebenarannya

Pengaruh Sistem Informasi Manajemen Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Palu

Berdasarkan hasil uji statistik diketahui bahwa secara parsial variabel Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) berpengaruh positif tetapi tidak signifikan

terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Palu. Hasil ini memberikan gambaran bahwa Pengimplementasian SIMDA dalam pengelolaan keuangan di setiap SKPD mendukung proses pengelolaan keuangan hingga menjadi laporan keuangan Pemerintah Kota Palu, namun tidak secara nyata (signifikan). Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian sebelumnya yakni penelitian yang dilakukan oleh Halens. 2014 yang meneliti tentang Analisis Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) terhadap kualitas laporan keuangan SKPD pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan dari penerapan aplikasi SIMDA keuangan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Begitu pula dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh P. Ayu Ratna Dewi dan Ni Putu Sari Harta Mimba tahun 2014 yang berjudul "Pengaruh Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah" (Studi empiris pada SKPD Pemerintah Kota Denpasar Bali). Hasil penelitian yang telah dilakukannya menunjukkan bahwa tingkat efektivitas Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan

Berdasarkan hasil uji statistik yang menunjukkan pengaruh positif Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah terhadap kualitas laporan keuangan ini didukung dengan hasil tanggapan responden pada variabel Implementasi Sistem Informasi Manajemen daerah yaitu dimensi faktor teknis yang menyatakan bahwa SIMDA memiliki metode penghitungan untuk memecahkan masalah pengelolaan keuangan, mengikuti prosedur akuntansi yang benar, dan memiliki kemampuan dalam menanggapi permintaan data sesuai waktu yang ditentukan. Fasilitas teknis yang disediakan oleh SIMDA ini diakui responden telah membantu dalam menghasilkan laporan keuangan, begitupula dengan tanggapan

responden terkait faktor operasional yang menyatakan SIMDA mudah dalam memproses input maupun output data, dapat mengurangi tingkat kesalahan serta membantu melakukan proses keuangan dengan tepat waktu. Keberadaan SIMDA yang terbukti mampu memudahkan proses keuangan pemerintah daerah sejalan dengan pernyataan Djaja dalam (Budiman, Fuad dan Arza, Fefri Indra. 2013), yang menyatakan Aplikasi SIMDA merupakan aplikasi database yang bertujuan untuk mempermudah pengelolaan keuangan daerah di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Walaupun Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) dari hasil pengujian statistik menunjukkan hubungan yang positif terhadap Kualitas laporan keuangan pemerintah Kota Palu, tetapi dari nilai sig t sebesar 0,090 menunjukkan adanya pengaruh yang tidak signifikan.

SIMDA sebagai bentuk pemanfaatan teknologi informasi ternyata pada penelitian ini tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Kota Palu. Hasil ini sejalan dengan penelitian sebelumnya oleh Mirnayanti dengan judul Pengaruh kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan Teknologi informasi, dan pengendalian intern terhadap Nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah (Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Majene Sulawesi Barat) yang menyatakan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh tidak signifikan terhadap nilai laporan keuangan pemerintah daerah.

Hasil penelian ini didukung pula dengan beberapa fakta empiris yang menyebabkan tidak signifikannya pengaruh Implementasi SIMDA dengan kualitas Laporan Keuangan antara lain, dikarenakan pengelolaan keuangan yang saat ini dalam masa peralihan yang sebelumnya menggunakan SAP berbasis kas, sekarang terhitung januari 2015 beralih ke SAP berbasis akrual dimana unsur laporan keuangan yang digunakan pada SAP berbasis kas terdapat beberapa perbedaan dengan unsur laporan keuangan pada SAP berbasis akrual sehingga

Aplikasi SIMDA perlu penyesuaian untuk bisa menghasilkan laporan keuangan sesuai standar akuntansi yang berlaku. Hal ini menyebabkan ada beberapa informasi hasil keluaran SIMDA harus diolah secara manual untuk bisa disajikan sebagai laporan keuangan sesuai standar akuntansi yang berlaku

Belum terintegrasinya antara pengelolaan keuangan, aset, pendapatan dan gaji menjadi hal yang juga menyebabkan tidak signifikannya pengaruh Sistem Informasi Manajemen Informasi (SIMDA) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Palu.

SIMDA Keuangan yang digunakan Pemerintah Kota Palu setiap tahun menggunakan versi yang berbeda, informasi dihasilkan hanya terbatas pada informasi keuangan tahun bersangkutan. Kondisi ini membuat pengelola keuangan terutama bagian akuntansi harus melakukan proses manual untuk bisa menghasilkan informasi yang menggambarkan perbandingan antara keadaan tahun sekarang dan keadaan tahun sebelumnya.

Intinya aplikasi SIMDA yang digunakan Pemerintah Kota Palu belum terimplemtasi secara maksimal sehingga harus didukung proses proses manual agar dapat menghasilkan informasi yang akuntabel.

Pengaruh Kegiatan Pengendalian terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Palu

Hasil pengujian hipotesis dengan menggunakan analisis regresi menunjukkan bahwa kegiatan pengendalian mempengaruhi secara signifikan kualitas laporan keuangan pemerintah Kota Palu. Hal ini berarti bahwa apabila kegiatan pengendalian semakin ditingkatkan maka kualitas laporan keuangan pemerintah Kota Palu akan lebih baik.

Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya oleh Muliati (2014) dengan judul Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Palu. Penelitian dengan hasil yang sama juga telah dilakukan sebelumnya oleh Tuti Herawati

(2014) dengan judul “Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Survey pada SKPD Pemerintah Kabupaten Cianjur). Keduanya menunjukkan hasil salah satu variabel yang diteliti yaitu unsur kegiatan pengendalian berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Hasil uji ini didukung dengan tanggapan responden, dimana untuk variabel kegiatan pengendalian diperoleh nilai mean sebesar 4,12. Berdasarkan kriteria yang ditetapkan maka kegiatan pengendalian termasuk dalam kategori baik.

Secara garis besar kegiatan pengendalian yang telah di implementasikan oleh Pemerintah Kota Palu pada Satuan Kerja Perangkat Daerahnya tergolong memadai sebagai tindakan yang diperlukan untuk mengatasi resiko serta penerapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur. Namun masih ada beberapa tindakan yang perlu dimaksimalkan terkait kegiatan pengendalian seperti otorisasi data/transaksi sesuai prosedur yang telah ditetapkan, pemerintah harus memastikan pengelohan data/transaksi telah melalui prosedur otorisasi yang jelas.

Kaitannya dengan pengelolaan keuangan, kegiatan pengendalian dapat dikatakan telah dilaksanakan dengan lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, ini menunjukkan bahwa SKPD Pemerintah Kota Palu semakin menyadari pentingnya kegiatan pengendalian dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah agar dapat menghasilkan laporan keuangan yang andal.

Berdasarkan fakta diatas dapat disimpulkan bahwa kegiatan pengendalian berperan penting dalam pengelolaan keuangan yang bertujuan untuk peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah Kota Palu. Semakin baik kegiatan pengendalian yang dilaksanakan maka akan semakin baik pula kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Dan ini sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dari penelitian ini.

Melalui pelaksanaan kegiatan pengendalian yang semakin baik diharapkan dapat meminimalisir temuan atas lemahnya Sistem Pengendalian Intern sehingga dapat terus meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah Kota Palu. Harapan yang lebih jauh lagi bahwa dengan kualitas laporan yang terus membaik, Opini yang dua tahun terakhir ini telah diperoleh yaitu Wajar Tanpa Pengecualian dapat terus dipertahankan oleh Pemerintah Kota Palu.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis uji statistik dan wawancara maka penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Secara deskriptif Sistem Informasi Manajemen Daerah dan Kegiatan Pengendalian telah diimplementasikan dalam pengelolaan keuangan SKPKD maupun SKPD Pemerintah Kota Palu dan berada pada kategori baik.
- b. Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah dan Kegiatan Pengendalian secara bersama-sama dapat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Palu.
- c. Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Palu.
- d. Kegiatan Pengendalian berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Palu.

Keterbatasan

Pemanfaatan SIMDA oleh responden yang hanya sebatas SIMDA keuangan menyebabkan jawaban responden dalam menilai variabel SIMDA kurang terwakili terutama tentang kendala yang dihadapi dalam implementasi SIMDA

Rekomendasi

1. Pemerintah Daerah Kota Palu diharapkan secara aktif mengkomunikasikan ataupun mengusulkan hal-hal yang perlu dikembangkan dalam aplikasi SIMDA dan dapat lebih maksimal mengimplementasikan SIMDA dalam pengelolaan keuangannya dengan mengintegrasikan SIMDA Keuangan dengan Aplikasi SIMDA lainnya seperti SIMDA BMD, SIMDA Pendapatan atau SIMDA Gaji.
2. Pemerintah Daerah Kota Palu seharusnya lebih memperhatikan pengamanan aset dengan mengupayakan ketersediaan brankas di setiap SKPD sebagai tempat untuk mengamankan uang atau barang berharga lainnya
3. Diharapkan kepada peneliti selanjutnya agar dapat mengembangkan penelitian tentang kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dengan menggunakan variabel lainnya seperti pengendalian lingkungan dan pemantauan, kompetensi pengelola keuangan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota Palu. Sehingga menambah referensi dalam memperkaya ilmu pengetahuan dan mengidentifikasi faktor-faktor lain yang benar-benar berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Prof. Dr. Ridwan, S.E.,M.Si., Ak. Ketua Tim Pembimbing dan Dr. Vita Yanti Fattah, SE., M.Si. Anggota Tim Pembimbing atas kesediaan waktunya dalam memberikan bantuan, saran, petunjuk dan arahan yang diberikan dari awal sampai dengan selesainya penelitian ini, Semoga penelitian ini dapat menjadi sumbangan yang bermanfaat dan mendorong lahirnya karya ilmiah yang lebih baik dikemudian hari.

DAFTAR RUJUKAN

- Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan. *Pengenalan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA)*. diakses 04 Desember 2015. Melalui <http://www.bpkp.go.id/sakd/>
- Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan. 2006. *Pengenalan Sistem Informasi Manajemen Daerah*. Jakarta : Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan.
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Daerah. 2009. *Modul Gambaran Umum Sistem pengendalian Intern Pemerintah*. Jakarta : Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan.
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Daerah. 2009. *Modul Kegiatan Pengendalian*. Jakarta : Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan.
- Budiman, Fuad dan Arza Feri Indra. 2013. Pendekatan Technology Acceptance Model dalam Kesuksesan Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah. *Jurnal WRA, 1 (1), 78-110*.
- Dewi, P Ratna Ayu dan Mimba, Ni Putu Sari Harta. 2014. Pengaruh Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Empiris pada SKPD Pemerintah Kota Denpasar. *Jurnal Akuntansi Universitas Udayana.8.3 (2014) : 442-457*
- Enterprise Risk Management — Integrated Framework. September 2004 : diakses 3 Desember 2015. Melalui : <http://www.coso.org/>
- Fausia, Riza Ayu. 2014. *Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan*
- Gordon, B.Davis. 2002, *Kerangka Dasar Sistem Informasi Manajemen*. Jakarta: PPM.
- Haza, Irfan Ikhwanul. 2015. *Pengaruh Pemanfaatan Tehnologi Informasi dan Pengawasan Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi empiris pada SKPD Pemerintah*

- Kota Padang). Skripsi. Padang : Program Sarjana Universitas Negeri Padang.
- Herawati, Tuti. 2014. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Survei pada Organisasi Perangkat Daerah Pemda Cianjur. *Jurnal STAR-Vol XI, No. 1-2014*
- Machmud, Rizan. 2013. Hubungan Sistem Informasi Manajemen dan Pelayanan dengan Kinerja Pegawai pada Rutan Makassar. *Jurnal Capacity STIE AMKOP Makassar. 9(1)*,
- Muliati. 2012. *Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Kota Palu*. Tesis. Palu : Program Pascasarjana Universitas Tadulako.
- Nurillah, As Shifa.2014. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), Pemanfaatan Tehnologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada SKPD Kota Depok). *Diponegoro Jurnal of Accounting Volume 3 Nomor 2 ISSN: 2337-3806*
- Ole, Halens Ryanlie. 2014. *Analisis Implementasi SIMDA terhadap Kualitas Laporan Keuangan SKPD Kabupaten Minahasa Tenggara*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Entitas Pelaporan
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
- Rahadi, Dedi Rianto. 2007. *Peranan Teknologi Informasi dalam Peningkatan Pelayanan di Sektor Publik*. Disampaikan dalam : Seminar Nasional Teknologi 2007 (SNT 2007), Yogyakarta, 24 November 2007: ISSN: 1978 – 9777.
- Riduwan dan Sunarto. 2009. *Statistika, untuk penelitian Pendidikan, Sosial,Ekonomi Komunikasi dan Bisnis*. Bandung : Alfabeta
- Sari, Intan Pramita. 2013. *Analisis Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota*. Skripsi. Padang : Program Sarjana Universitas Negeri Padang. Melalui : <http://ejournal.unp.ac.id/students/index.php/akt/article>
- Tantriani, Sukmaningrum. 2012. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten dan Kota Semarang)*. Skripsi. Semarang : Program Sarjana Universitas Negeri Semarang.
- Umar, Husein. 2000. *Metodologi Penelitian, Aplikasi dalam Pemasaran*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Umum,
- Undang Undang Dasar 1945
- Undang-Undang No. 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara.
- Wahyuni, Dewi. 2014. *Pengendalian Internal (COSO)*: Artikel melalui: <http://wahyunidewi77.blogspot.co.id/2014/11/>